

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Transparansi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Timor Tengah Utara sudah berjalan dengan baik karena selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan–aturan berusaha serta syarat–syarat memperoleh izin berusaha melalui (*Online Single Submission* - OSS).

2. Kondisional

Tidak ada kesesuaian antara ketentuan-ketentuan untuk memiliki izin berusaha dengan kemampuan masyarakat sehingga pada umumnya masyarakat tidak memahami aturan–aturan tentang izin berusaha dan tidak tahu cara-cara mengakses OSS untuk mendapatkan izin berusaha secara online karena pendidikan masyarakat tidak memadai dan tidak ada pelatihan–pelatihan dari Dinas PTSP terkait penggunaan aplikasi OSS untuk mendapatkan izin berusaha.

3. Partisipasi

Masyarakat belum mendukung Penyelenggaraan Pelayanan publik karenabelum mengetahui jelas tentang pentingnya atau fungsinya izin berusaha dan masyarakat menganggap bahwa memiliki Surat Izin Usaha hanya untuk dikenakan pajak pada hal surat itu sangat penting bagi

masyarakat yang melakukan kegiatan berusaha agar usahanya tidak ilegal dan bisa terbantu apabila ingin menambahkan modal usahanya dari bank.

4. Prosedur Pelayanan

Ketersediaan sumber daya manusia pada DPMPTSP Kab. TTU masih sangat terbatas sehingga saat masyarakat membutuhkan pelayanan harus menunggu karena pegawai yang ada harus menjalankan dua tugas seperti harus melayani pada loket informasi dan juga harus memberikan dokumen kepada masyarakat.

5. Waktu Pelayanan

Ketersediaan sarana dan prasarana pada DPMPTSP Kab. TTU masih sangat terbatas sehingga saat masyarakat membutuhkan bantuan petunjuk untuk mengakses OSS harus bawa laptop sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan (*Online Single Submission–OSS*) diDinas PMPTSP Kab. TTU maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Dinas PMPTSP perlu melakukan sosialisasi secara terukur dan terencana dengan baik dengan materi yang sesuai.
2. Pegawai Dinas PMPTSP perlu dibekali dengan Bimtek atau workshop berkaitan dengan Pengelolaan OSS.
3. Dinas PMPTSP perlu pelatihan–pelatihan kepada para pelaku usaha terkait dengan cara-cara mengakses izin berusaha melalui (*Online Single Submission–OSS*).

4. Dinas PMPTSP lebih proaktif dalam pemahaman-pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya kepemilikan izin berusaha.
5. Dinas PMPTSP perlu pengadaan sarana dan prasarana terkait pemenuhan kebutuhan dalam memberikan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit
- Agus, Dwiyanto, 2005. *Perwujudan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. PustakaPelajar. Yogyakarta.
- Ainur Rohman, A. dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Alfian Ibrahim., 1983. *Bunga Rampai Metode Penelitian Sejarah*, IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Anderson, James E., 1978. *Public Policy Making*, Holt, Rinehart and Winston: Chicago.
- Arifin Tahir, 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Pustaka Indonesia Press: Jakarta
- Arikunto Suharsimi., 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Edisi Revisi V Jakarta.
- Atik, dan Ratminto. 2005 *Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengejaan model Konseptual, Penerapan Citizen's chaster dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Basyiruddin Usman. 2002. *Media Pendidikan*. Ciputat Perss; Jakarta
- Djam'an Satori dan Aan Komariah., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung
- Dunn, W. N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International Inc. Englewood Cliffs.
- Edwar N Gladen dalam Riant Nugroho., 2012. *Public Policy*, PT Elex Media Komputindo(Kompas Gramedia): Jakarta
- J Supranto. 2002., *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*, Rieneke Cipta: Jakarta
- Komariah dan Djam'an Satori. 2010. *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung; Alfabeta

- Lexy J. Moleong 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samuel P Huntington 1968. *Political Order in Changing Societies*. Yale University: New Haven.
- Setiawan, Guntur (2004). *Implementasi Balam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset: Bandung
- Sugiono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung Said Sainal Abidin 2012. *Kebijakan Publik Ed. 2*, Salemba Humanika: Jakarta.
- Supriyadi, Anwar, 2004. "Etika Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance" *Jurnal Good Governance, STIA-LAN, Jakarta, Vol.3, No:1, Mei 2004*.

SUMBER LAIN

- Undang – Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Website, Home-Page, Situs Internet, Radio dan TV
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MEMPAN) Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MEMPAN) Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
- Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lampiran Foto Penelitian



Kepala DPMPTSP : Eussbius Sila, S.Pt
Senin, 22 November 2021



Kepala Bidang PTSP : Gaudensiana Fios, S.Sos
Rabu, 24 November 2021



Wawancara bersama bapak Pithein Tadjibu, S.STP



Wawancara bersama pelaku
usaha berinisial BO



Wawancara bersama FT selaku pengusaha